

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020, September). Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407-418.
- ANTARA. (2021, September 12). *Jumlah pulau Indonesia kini 17.000*. Diambil kembali dari Antara News: www.antaraneews.com
- Apriyanti, P. (2018). *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan) Skripsi*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Atika Puspita Sari, K. C. (2022). The Effect Of Motor Vehicle Tax Services On Taxpayer Satisfaction In The Samsat Of Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, III(1), 110-114.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ispryarso, B. (2011). Perubahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 437-432.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2021, Agustus 7). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. Dipetik 2 2022, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri: dukcapil.kemendagri.go.id
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lubis, M. S. (2013). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1(1), 1-10.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Meylani M. Arina¹, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 27-28.

- Negeri, K. D. (1996). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.
- Pati, B. (2016, Oktober 5). Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 62 . *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Pati.
- Pati, B. (2017, Oktober 16). Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 63. *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame*. Pati.
- Pati, P. K. (2022, Mei 12). *Profil Pemerintahan*. Diambil kembali dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati: www.patikab.go.id
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. (2011, Januari 4). Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3. *Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Pati.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003, April 5). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007, Juli 17). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009, September 15). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014, Oktober 2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Poernomo, S. Z. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. (2004). *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjondro, M. J. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1.